

HIKAYAT WONG TENGGER

Kisah Peminggiran dan Dominasi

FOTO: POERBAYA

Pentingnya Meningkatkan
Keberdayaan Masyarakat Tengger untuk
Melestarikan Kawasan Konservasi
Balai Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru

Hikayat Wong Tengger:
Kisah Peminggiran dan Dominasi

**Pentingnya Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Tengger
untuk Melestarikan Kawasan Konservasi
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

Mei 2013

Ringkasan

WONG TENGGER adalah masyarakat Suku Tengger, sub-Suku Jawa, yang menetap di sekitar dan dalam kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, tepatnya di Kabupaten-kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur. Mereka adalah salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) Taman Nasional yang semestinya diberi peran penting dalam pengelolaan kawasan pelestarian sumber daya alam itu. Sebab, Bromo-Tengger-Semeru adalah pusat-pusat kosmos kehidupan sosial dan spiritual mereka, dengan Bromo sebagai poros intinya.

Tanpa Bromo-Tengger, masyarakat adat Tengger akan benar-benar kehilangan identitas sosial mereka. Maka, merekalah yang paling berkepentingan merawat dan menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus tanah adat itu.

Namun, andai pun saat ini masyarakat adat Tengger dilibatkan dalam suatu pengelolaan kolaboratif Taman Nasional sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai *monitoring* dan evaluasi, tampaknya mereka belum benar-benar siap. Sebabnya adalah, disadari atau tidak, masyarakat adat ini mengalami krisis identitas akibat berbagai-bagai gempuran budaya “asing” terhadap sistem budaya dan pranata sosial mereka, serta dominasi peran dan hegemoni pelaku-pelaku sosial lain kepada kesejatiannya mereka yang merdeka.

Gempuran budaya, dominasi, dan hegemoni itu mereka alami sejak zaman VOC mendapat kompensasi wilayah pantai utara Jawa dari Mataram pada paruh akhir abad ke-17 sampai sekarang.

Bagaimanapun, pelibatan-aktif mereka dalam pengelolaan kolaboratif Taman Nasional adalah langkah strategis yang patut diwujudkan. Sebab, siapatah lagi selain mereka yang punya motif paling kuat untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kawasan Bromo-Tengger-Semeru? (*Bromo-Tengger-Semeru adalah pusat-pusat kosmos kehidupan sosial dan spiritual masyarakat adat Tengger, dengan Bromo sebagai poros intinya. Tanpa Bromo-Tengger, masyarakat adat Tengger akan benar-benar kehilangan identitas sosial mereka.*)

Hanya saja, sekuat apa pun motif melindungi dan melestarikan, tetap mesti dibarengi dengan potensi untuk melindungi dan melestarikan yang juga kuat.

Upaya memperkuat potensi—meningkatkan keberdayaan—masyarakat Tengger itu perlu diawali dengan langkah-langkah **menguatkan identitas sosial**, beriringan dengan upaya memfasilitasi **penerapan Pendidikan Kritis** (*Critical Pedagogy*) bagi mereka, sembari memfasilitasi **pembangunan sarana dan prasarana** perlindungan/pelestarian Taman Nasional: sarana-sarana tertentu yang pengadaannya perlu disegerakan demi mencegah kerusakan yang lebih parah. Di antaranya adalah merelokasi jalur kendaraan bermotor, mengatasi *overload*-nya konsentrasi wisatawan di lokasi-pandang Pananjakan-1, dsb. ●



Para dukun pandhita (pemuka agama) Tengger masa lalu.

Daftar Isi

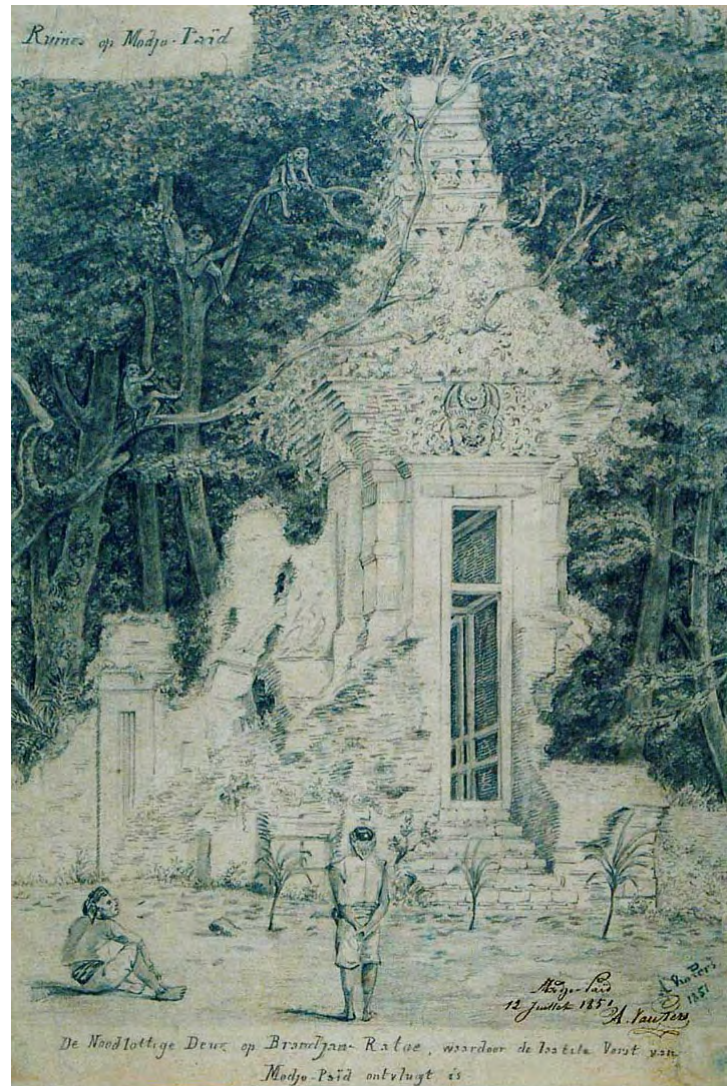
Ringkasan	i
Walandit, Desa Tengger Tertua	1
Wong Tengger: "Merdeka" dan Berbeda	4
Peminggiran, Hegemoni, dan Penggerusan Identitas	7
Dilema Ekowisata Bromo-Tengger	12
Pengelolaan Kolaboratif Berlandaskan Lemahnya Motif	15
Meningkatkan Keberdayaan lewat Penguatan Identitas, Pendidikan Kritis, dan Fasilitasi	20
Sahabat Bromo	22
Usulan Langkah-langkah	24
<i>Lampiran: Melestarikan Edelweis Jawa, Simbol Turunnya Wahyu</i>	26
<i>Lampiran: Ranupane, di Tengah Ancaman Erosi Kultural dan Erosi Ekologi</i>	29

Walandit, Desa Tengger Tertua

Majapahit, paruh awal abad ke-14. Masyarakat Desa Walandit bersengketa dengan tetangga mereka, para pejabat Desa Himad, tentang status otonom (*swatantra*) Desa Walandit. Pertikaian itu segera memanas dan membuat geger desantara Majapahit, sampai-sampai beberapa petinggi kerajaan turun tangan untuk menengahi—termasuk di antaranya Gajah Mada, yang saat itu menjabat *Rakryān Mapatih* Janggala dan Kadiri.

Orang-orang Walandit merasa bahwa sejak dahulu kala desa mereka berstatus *swatantra*, dan mereka ditugasi Sang Raja untuk memelihara candi leluhur (*dharma kabuyutan*) di Walandit; Mereka hanya mengakui kekuasaan *dharma kabuyutan* atas lembah dan bukit sekitar Walandit. Maka, mereka menolak kehendak para pejabat Desa Himad yang berniat mengatur-atur dan menguasai mereka.

Sebagai bukti, warga Walandit mengajukan piagam batu berlencana Raja Sindok yang telah mereka terima 400-an tahun sebelumnya. Piagam itu—Prasaṣti Muñcang—menerangkan tentang sebuah desa bernama Walandit yang merupakan tempat suci yang dihuni para *hulun hyang*, yakni orang-orang yang mengabdikan hidupnya bagi para dewata. Sang Raja, Mpu Sindok, juga memerintahkan untuk mendirikan *prasada kabhaktyan* bernama Siddhayoga, tempat para pendeta memanjatkan persembahan kepada



Sang Hyang Swayambhuwa (Dewa Brahma) di Walandit.

Sengketa antara kedua desa itu diputuskan di luar pengadilan, dimenangkan oleh masyarakat Walandit. Keputusannya dijadikan piagam—Prasaŕti Himad-Walandit—yang disusun oleh *Pamegat Tirwan* bernama Wangsapati atas nama Samgat Jamba, Samgat Pamotan, Mpu Kandang-an, *Rakryān Mapatih* Mpu Mada, dan Sang Arya Rajadhikara. Beberapa dekade kemudian, status Walandit makin dikuatkan oleh Sri Paduka Bathara Hyang Wekas ing Sukha (gelar anumerta Raja Hayam Wuruk) seperti termaktub pada Prasaŕti Pananjakan. Dalam prasaŕti ini, Sang Raja melarang penagihan pajak pada bulan *tibileman* atau akhir bulan Asada dari warga Walandit dan wilayah keramat (*hila-hila*) sekitarnya, karena di sana sejak dulu tinggal para *hulun hyang*, abdi dewata, dan pada bulan itu penduduknya berkewajiban melakukan persembahan kepada Sang Hyang Gunung Brahma (Gunung Bromo).

Menurut J.G. de Casparis, arkeolog Belanda, yang diamini oleh banyak peneliti, Walandit kini bernama Blandit, merupakan sebuah dukuh di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Malang—di lereng barat Gunung Bromo. Di dukuh inilah, pada 1913, Prasaŕti Muŕancang dari masa Mpu Sindok ditemukan.

Penduduk Desa Walandit, yang punya peran penting sejak masa pemerintahan Mpu Sindok sampai Hayam Wuruk, itu diyakini sebagian peneliti sebagai cikal-bakal masyarakat Tengger. Mereka telah menghuni kawasan Tengger jauh sebelum Majapahit ada dan berjaya. Salah satu peneliti yang berani menyatakan itu adalah Dwi Cahyono, Antropolog Universitas Negeri Malang. Ia yakin, berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan, masyarakat Tengger sudah mendiami kawasan sekitar Gunung Bromo saat Mpu Sindok memerintah pada abad ke-10. Bukti arkeologis yang dimaksud di antaranya adalah prasaŕti Lingga Sutan (929 M), Muŕancang (944 M), Jeru-jeru (930 M), Gulung-gulung (929 M), dan prasaŕti Walandit (tanpa tahun).

Sementara itu, Dr. Ayu Sutarto, Budayawan dan Peneliti Tradisi dari Universitas Jember, mengajak kita mengkaji ulang keyakinan bahwa nenek moyang orang

Prasaŕti Himad-Walandit merekam titah Gajah Mada saat memenangkan pihak Walandit atas Himad:

“Jika ada yang berbuat jahat, merusak, lindungilah keselamatan Sang Hyang *Dharma Kabuyutan*. Itulah tugas Kepala Desa (*Rama*) Walandit terhadap Sang Hyang Dharma yang harus dimaklumi. Singkatnya, berdasarkan pengetahuan dan bukti yang kuat, secara tegas persidangan ini memutuskan bahwa Sang Hyang *Dharma Kabuyutan* adalah hak Walandit. Dengan demikian, gugatan pihak Himad diputuskan kalah melawan pihak *Rama* Walandit...”

Gua Podokoyo, sumber air masyarakat di Kecamatan Tosari, Malang.

Foto diambil antara tahun 1890–1902, koleksi Tropenmuseum, Belanda.



Tengger adalah pengungsi dari Majapahit. Paling tidak, menurut Ayu Sutarto, ada dua kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*, meskipun masyarakat Walandit bukan keturunan Majapahit, kehidupan beragama mereka tidak beda jauh dengan warga Kerajaan Majapahit pada umumnya, yakni melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bercorak Hindu-Budha. *Kedua*, penduduk Walandit dengan suka-cita menerima para pengungsi Majapahit yang terdesak ekspansi Kerajaan Islam Demak. Para pengungsi Majapahit itu kemudian menyatu dengan pribumi Walandit dan menurunkan orang-orang Tengger yang kita kenal sampai sekarang. ●



Upacara adat *tugel kuncung* atau *tugel gombak*: memotong rambut bagian depan anak Tengger saat berusia 4 tahun, agar ia senantiasa mendapat keselamatan dari Tuhan. Dalam foto, si anak dinaikkan kuda hias dan diarak dengan meriah. Rambut depannya baru saja dipotong.

Foto diambil pada 1927, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Wong Tengger: “Merdeka” dan Berbeda

Terkait hubungan masyarakat Tengger dengan Majapahit, Thomas Pigeaud, pakar Sastra Jawa dari Belanda yang dikenal karena studi monumentalnya tentang *Nagarakretagama*, menyatakan bahwa penduduk pegunungan Tengger adalah sebuah komunitas tersendiri yang punya tradisi ritual sendiri, yang menyandarkan diri kepada perlindungan Roh Gunung. Dengan pernyataannya itu, ia menolak penyamaan kebudayaan masyarakat Tengger dengan kebudayaan warga Majapahit yang banyak menganut Hindu-Siwa. Pernyataan Pigeaud itu seperti menegaskan pendapat J.E. Jesper yang meyakini bahwa masyarakat Tengger pada awalnya adalah komunitas yang dengan sengaja memisahkan diri dari masyarakat Jawa lainnya: kehinduan orang Tengger awalnya hanya bersifat superfisial saja, dan komunitas ini tidak banyak punya hubungan dengan Majapahit—terlebih kebudayaan Majapahit yang sangat India-sentris.



Edi Purwanto dari Universitas Negeri Malang punya pendapat yang kurang lebih sama. Yakni, merujuk kepada Prasaŕti Pananjakan (ditemukan di Desa Wonokŕtri, Pasuruan, di lereng Gunung Pananjakan, pada 1880) yang berisi titah Raja Majapahit untuk membebaskan rakyat Tengger (Walandit) dari pajak dan pungutan lainnya pada bulan *titileman*, dan perintah kepada masyarakat Tengger untuk melakukan persembahan kepada Sang Hyang Gunung Brahma, tampaknya tersirat dua ketentuan. *Pertama*, pengakuan Tengger sebagai wilayah otonom. *Kedua*, penetapan batas-batas wilayah Tengger. Jika Tengger sejak

Dukun pandhita Tengger memantrai *prasen* (tempat air suci) dalam ritual *walagara*, puncak upacara perkawinan adat Tengger.

Foto diambil antara tahun 1915–1918, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

masa Mpu Sindok dianggap sebagai wilayah otonom, tentu sistem adat dan agama yang berkembang pada zaman itu juga berada di luar kendali Kerajaan Medang, lalu Singasari, dan Kerajaan Majapahit yang ketiganya menganut Hindu-Siwa. Faktanya, menurut beberapa *dukun pandhita* (pemuka agama) Tengger, di antaranya Mujono, Sutomo, dan Ngatrulin, tempat peribadatan asli orang Tengger adalah *poten* di barat Gunung Bromo dan sanggar-sanggar *padanyangan* atau *pamujan* yang ada di setiap desa di kawasan Tengger. Artinya, masyarakat Tengger pada mulanya tidak mengenal dan tidak menjalankan ritual di tempat-tempat ibadah seperti pura atau wihara.

Namun, *Wong Tengger* sendiri tampaknya tidak ambil pusing akan Walandit dan hubungan-hubungan politis atau spiritual mereka dengan Majapahit sejak dahulu kala, meski mereka meyakini nenek moyang orang Tengger adalah keturunan Majapahit. Nama Tengger, berdasarkan salah satu legenda masyarakat, berasal dari paduan suku kata terakhir dari nama dua nenek moyang mereka, Rara Anteng dan Jaka Seger (*teng* dan *ger*). Rara Anteng dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit, sementara Jaka Seger diyakini sebagai putra seorang brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger.

Mereka telah lama mendiami kawasan Tengger dalam damai dan bahagia. Thomas Stamford Raffles, yang menjadi Letnan Gubernur Jawa ketika Kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Kerajaan Belanda, pada 11 September 1815 melaporkan perjalanannya ke beberapa distrik di Jawa bagian timur lewat pidato di depan Masyarakat Seni dan Sains Batavia (*Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*): saat berkunjung ke kawasan Tengger, ia dapati masyarakat Tengger hidup dalam damai, tertib, teratur, rajin bekerja, jujur, dan selalu riang-gembira. Selanjutnya dalam *The History of Java* ia menulis: mereka tidak mengenal candu dan judi. Ketika ia menanyakan tentang pencurian, perselingkuhan, perzinahan, atau berbagai kejahatan lainnya, mereka para *wong gunung* itu menjawab, hal-hal buruk itu tidak ada di Tengger.

Kondisi aman-damai itu masih dijumpai Ayu Sutarto, Budayawan dan Peneliti Tradisi dari Universitas Jember yang juga menjabat wakil ketua Masyarakat Peduli Bromo, saat ia meneliti masyarakat Tengger

Sebagai wilayah perdikan (*sima*) yang otonom (*swatantra*) sejak zaman Mpu Sindok, tentu sistem adat dan agama yang berkembang di kawasan Tengger pada zaman-zaman itu juga berada di luar kendali Kerajaan Medang, lalu Singasari, dan kemudian Majapahit yang ketiganya menganut agama dan tradisi Hindu-Siwa.



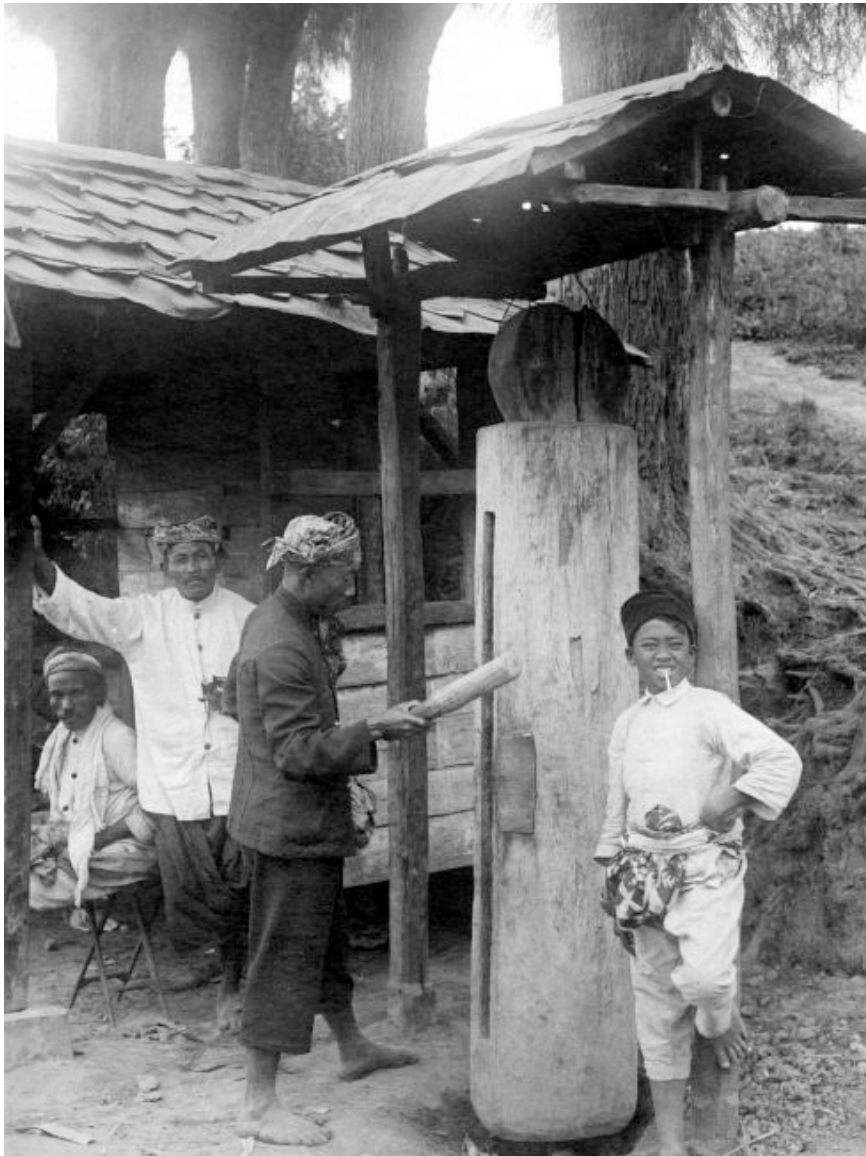
Dukun pandhita Tengger melakukan upacara pemberkatan pembangunan rumah baru, 1971.

Foto diambil tahun 1971, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

selama lima tahun pada 1990-an. Ia mencatat, angka kejahatan di desa-desa Tengger pada umumnya hampir selalu nol. Jika didapati tindak kriminal, pelakunya adalah wong *ngare* (penduduk dataran rendah), bukan orang Tengger.

Menurutnya, suasana aman, tenteram, lagi penuh toleransi yang tecermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger itu dapat dijadikan acuan dalam periode formatif Indonesia modern. Bahkan ia menegaskan, Tengger adalah sebuah pusaka saujana (*cultural landscape*) yang, jika dibina dan dikelola dengan benar, keberadaannya akan dapat memberi sumbangsih lebih berarti bukan hanya bagi masyarakat Tengger, melainkan juga bagi Indonesia.

Bagaimana pun, suasana aman-tenteram di kawasan Tengger yang “merdeka” dan berbeda dari kebanyakan orang Jawa itu bukan berarti tanpa masalah. ●



Pos ronda dan kentongan di Tosari, Pasuruan.

Foto diambil antara tahun 1900–1940, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Peminggiran, Hegemoni, dan Penggerusan Identitas

Desantara Tengger, yang penduduknya dulu dikenal sebagai petani tradisional yang tangguh, yang ramah dan suka memuliakan tamu-tamu mereka, yang tidak mengenal kasta, ini telah sejak lama menjadi medan persaingan (kontestasi) yang kompleks antarberbagai kelompok dan kepentingan dalam bidang ekonomi dan agama—yang berpengaruh besar terhadap perubahan sosial-budaya *Wong Tengger*. Awalnya adalah pembukaan wilayah Tengger pada akhir abad ke-17 sebagai sentra perkebunan yang luas, terutama di lereng bawah, oleh VOC Belanda. Cengkeh, kopi, kakao, tumbuh subur di sana, dan mendorong perpindahan penduduk dari luar Tengger.

Robert Hefner, antropolog dari Boston University, penulis *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, mencatat, mula-mula banyak warga Madura dan orang-orang Jawa bagian barat pindah mendiami wilayah Pegunungan Tengger di lereng bawah. Seiring makin deras arus migrasi, warga di lereng bawah yang rata-rata beragama Islam pun beranjak mendominasi dalam berbagai bidang, mengalahkan masyarakat Tengger di lereng atas. Tak hanya dominan dalam ruang sosial-politik, mereka kemudian juga mendominasi perumusan berbagai kebenaran atas dasar Agama Islam.

Pada zaman pendudukan Jepang, kondisi sosial dan ekonomi Tengger menjadi runyam. Jepang merusak perkebunan-perkebunan milik orang-orang Eropa di lereng bawah, menanaminya dengan



Satu keluarga bangsa Armenia dalam perjalanan menuju Tosari, Pasuruan.

Foto diambil antara tahun 1890–1930, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Banyak pedagang Armenia dari Amsterdam merantau ke Hindia-Belanda sejak 1800-an. Mereka terutama menetap di Jawa, mendirikan perusahaan serta perkebunan.

pohon jarak untuk bahan bakar kapal dan pelumas senjata. Petani Tengger dipaksa membatasi pengusahaan tanaman perdagangan. Jepang juga menebangi pepohonan di Tengger untuk bahan bakar kereta api dan industri batu bara, padahal pepohonan itu berfungsi penting bagi kelestarian air dan tanah. Perilaku tentara Jepang yang kejam, ditambah beban kerja-paksa, membuat banyak warga muda Tengger melarikan diri ke dataran bawah.

Setelah Indonesia merdeka, keadaan cukup membaik, situasi ekonomi di pegunungan Tengger kembali bangkit. Namun, kondisi itu tak berlangsung cukup lama karena satu generasi kemudian terjadi tragedi G30S/1965, yang lalu menjadi gerbang berbagai perubahan sosial besar di Tengger.

Hefner melaporkan, sejak masa penjajahan ada dua golongan utama yang mendominasi kawasan Tengger. Di dataran rendah, di Pasuruan dan sekitarnya, NU (Islam) merupakan organisasi paling besar, sementara kelompok kejawen mendominasi dataran tinggi Tengger. Mayoritas kelompok kejawen inilah yang kelak bergabung dengan PNI dan PKI.

Pada 1960, pemerintah Orde Lama menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5/1960), yang menjadi landasan program redistribusi tanah atau *land-reform*. Dalam perkembangannya, di kawasan Tengger, orang-orang PNI banyak



Berfoto dengan penduduk lokal dalam perjalanan di sekitar Tosari.

Foto diambil antara tahun 1890–1900, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

yang terlibat kasus-kasus penggelapan tanah-tanah bekas perkebunan untuk kepentingan pribadi, sementara PKI memanfaatkan momentum itu untuk merebut simpati para petani miskin dengan aksi-aksi perampasan tanah dari “tuan-tuan tanah”, para pemilik lahan-lahan luas.

Praktis, ketika G30S meletus, darah segera tumpah-ruah membasahi bumi Tengger. Pembantaian menggila bukan hanya semata karena klaim-klaim kebenaran agama dan keyakinan politik antara orang bawah dengan orang atas (Tengger), tetapi juga bersebab perebutan kepemilikan tanah dan isu-isu *landreform*. Selain itu, juga disebabkan persaingan berebut ruang sosial antara orang Tengger dengan para migran Jawa-Madura di lereng bawah yang berlangsung sejak zaman penjajahan.

Sepanjang kurun akhir 1960-an sampai pertengahan 1970-an itu, sekadar menjadi *Wong Tengger* saja sudah merupakan hal mengerikan. Identitas “Tengger” menimbulkan ketakutan tersendiri karena selalu dilekatkan dengan “non-Islam”, antek PKI. Fenomena itu jelas sangat buruk dampaknya bagi *Wong Tengger*.

Trauma massal tentu saja menghantui masyarakat Tengger pasca-G30S/1965. Dalam kondisi sekelam itu, identitas *Wong Tengger* kembali dicerai, kali ini oleh kebijakan pemerintah dalam hal beragama. Penguasa Orde Baru hanya mengakui adanya lima agama resmi, dan keyakinan masyarakat Tengger tidak termasuk salah satunya. Mereka adalah penganut Hindu-Jawa, atau *Agomo Budo-Tengger*—yang berbeda dengan agama Buddha maupun Hindu Dharma.

Lewat perdebatan alot antarpara *dukun pandhita* (pemuka agama) Tengger pada 1973, akhirnya diputuskan bahwa orang-orang Tengger secara resmi akan memeluk Agama Hindu. Keputusan itu pun tak mencapai mufakat, sebab dukun dari Desa Ngadas-Malang lebih memilih Buddha dibanding Hindu.

Namun, permasalahan agama Tengger rupanya tak kunjung selesai hingga hari ini. Tak sedikit peneliti yang merekam kekuatiran beberapa *dukun* Tengger akan upaya-upaya pemurnian (purifikasi) agama Hindu, atau tepatnya: intervensi kebiasaan Bali dalam susunan ritual adat Tengger. Kekuatiran itu dibenarkan salah satunya oleh Mbah Mudjono, Koordinator *Dukun* Tengger sekaligus Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Probolinggo. Ia mengaku, ada beberapa tokoh Bali yang mencoba membujuknya untuk menyertakan kebiasaan Bali dalam upacara adat di Tengger, dan ia menolaknya karena menurutnya adat Bali sama sekali berbeda dengan adat Tengger.

Selain “Balinisasi”, terjadi juga perebutan klaim antaragama: Islamisasi, Kristenisasi, dan Buddhanisasi. Persaingan antara pendakwah Budha dengan Hindu memang tak begitu kentara, tak tampak secara formal, tetapi terjadi di bawah permukaan sejak 1968 sampai sekarang. Sedangkan Islamisasi dan Kristenisasi berlangsung secara lebih mencolok mata.

Beriringan dengan masalah agama, kultur pertanian tradisional



Pasangan pengantin Tengger dan para undangan.

Foto diambil antara tahun 1915–1918, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Tengger berubah drastis akibat revolusi hijaunya Orde Baru. Tanaman pangan diganti tanaman komersial. Di lereng tengah, singkong dan jagung (makanan pokok orang Tengger) diganti kopi dan cengkeh. Di lereng atas, jagung diganti kentang, kubis, dan bawang merah. Pertanian baru di Tengger itu dimonopoli orang-orang kaya, karena industri pertanian butuh modal tak sedikit.

Di bidang politik, rezim Orba menerapkan kebijakan massa mengambang, *floating mass*, yang melarang partai politik punya cabang di tingkat kecamatan ke bawah. Terjadilah depolitisasi rakyat, pembodohan, dan “penjinakan” sikap kritis bahkan sebelum sikap itu dibangun masyarakat.

Pada saat yang sama, sistem pendidikan Orba yang kental unsur dominasi dan submissifnya (cenderung patuh kepada otoritas) lalu menciptakan lulusan bermental pegawai, pencari kerja, yang kehilangan fitrahnya sebagai individu merdeka berakal pikiran, dan lahirnya kaum intelektual yang bebal kepekaan sosialnya, serta banyaknya generasi muda yang berpikiran positifistik. Hal-hal itu menjadi salah satu sebab makin banyaknya generasi muda Tengger berpendidikan yang mencari kerja ke luar daerah, yang dampaknya adalah mengaburkan perbedaan *wong gunung* (orang dataran tinggi: Tengger) dengan *wong ngare* (orang dataran rendah), serta memperlemah loyalitas kelompok.

Berbagai-bagai masalah yang mendera masyarakat Tengger sejak zaman VOC hingga sekarang seperti terpapar di atas itu memicu krisis identitas dan menipisnya rasa percaya diri akan tradisi lokal mereka. Sebelumnya, pada zaman Jepang, tradisi Tengger sudah mulai terabaikan karena saat itu tak banyak orang Tengger yang cukup mampu untuk membiayai upacara. Masa itu, banyak teks-teks doa Tengger yang disembunyikan, hingga rusak karena cuaca dan dimakan rengat ketika ditemukan beberapa tahun kemudian.

Dalam kondisi krisis identitas tersebut, masyarakat Tengger menghadapi masalah hak ulayat: pada 14 Oktober 1982, dalam Kongres Taman Nasional se-Dunia ke-3 di Denpasar, Bali, pemerintah Indone-



Seorang anak muda Tengger di ladang jagung.

Foto diambil pada 1910, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Jagung adalah makanan pokok orang Tengger, sebelum nasi menjadi simbol kemakmuran. Jagung yang mereka tanam adalah varietas Indian berbiji putih. Dibanding jagung varietas baru, jagung putih ini batangnya lebih tinggi, bonggolnya lebih panjang, biji-bijinya lebih besar, dan zat tepungnya lebih banyak, juga lebih tahan terhadap hama dan jamur. Hanya saja waktu tanamnya lama: 10–12 bulan.

Saat ini petani Tengger lebih suka menanam sayur-sayuran karena nilai ekonominya lebih tinggi. Namun sebagian lahan mereka masih ditanami jagung, karena tidak semua orang Tengger mengganti makanan pokoknya dengan beras. Kini, nasi *aron* Tengger, yakni nasi jagung, menjadi makanan tradisional khas Tengger yang diminati banyak wisatawan kuliner.

sia menetapkan dataran tinggi Bromo, Tengger, dan Semeru sebagai Taman Nasional—“suatu kawasan atau wilayah yang dilindungi pemerintah dari perkembangan manusia dan polusi”.

Pagi hari 14 Oktober 1982 itu, masyarakat Tengger bangun dari tidur dan tiba-tiba mendapati tanah-tanah adat mereka berada dalam wilayah terlarang. Terlarang mengambil kayu bakar dari hutan, terlarang memetik *tanalayu* (edelweiss jawa, *Anaphalis javanica*) yang diperlukan untuk berbagai upacara adat, tak leluasa lagi berladang gilir-balik karena mungkin saja calon lokasi ladang baru sekarang telah dikapling pemerintah sebagai bukan-zona-pemanfaatan.

Penetapan Taman Nasional tanpa konsultasi publik sebelumnya ini kelak akan menimbulkan berbagai masalah sosial, yang berpangkal pada kecenderungan pemerintah menghegemoni dan meminggirkan masyarakat, terutama masyarakat adat. ●



Air terjun dekat Tosari.

Foto diambil antara tahun 1885–1900, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Dilema Ekowisata Bromo-Tengger



Meski membatasi ruang-gerak dan daya jelajah masyarakat adat Tengger, keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuka peluang pendapatan baru bagi mereka, terutama dalam bidang pariwisata. Sebab, salah satu fungsi taman nasional adalah fungsi wisata, selain fungsi perlindungan dan pelestarian (konservasi) serta pendidikan. Memang, sudah sejak sekitar 1940-an para wisatawan mulai sering mengunjungi Bromo-Tengger, meskipun jumlah dan kekerapannya belum sebanyak dan sesering saat ini, ketika Bromo-Tengger secara resmi dijadikan tujuan wisata oleh pemerintah dengan menetapkannya sebagai Taman Nasional. Banyak orang Tengger yang menyediakan rumah mereka sebagai penginapan



bagi para wisatawan, menjadi porter, menyewakan kuda, juga mengelola jeep dan sepeda motor sebagai sarana transportasi wisata. Ada yang melakukan pelayanan wisata itu secara paruh waktu, penambah kegiatan selain bertani di ladang atau pekerjaan lain; Ada yang melakukannya sebagai profesi utama—yang terakhir ini kebanyakan bekerja di hotel dan penginapan di sekitar Bromo-Tengger.

Panorama suatu tempat di Tosari.

Foto diambil antara tahun 1930–1936, koleksi Tropenmuseum, Belanda.

Namun, di balik riangnya kegiatan wisata yang menawarkan tambahan pendapatan dan janji-janji masa depan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Tengger, tersimpan potensi masalah baru, yakni percepatan kerusakan wilayah keramat Tengger dan isu-isu kerusakan lingkungan yang menyertainya. Inilah dilema pariwisata Bromo-Tengger. Pada satu sisi, meningkatnya pengunjung berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor wisata. Pada saat yang sama, di sisi lain, kerapnya kunjungan itu, jika tidak dikelola dengan benar, berpotensi merusak obyek wisata, tanah adat, wilayah keramat, ekosistem penting, yang pada gilirannya dapat memusnahkan bukan saja pendapatan ekonomi dari sektor wisata, tetapi juga meruntuhkan bangunan sosial dan identitas masyarakat, karena efek domino dari rusaknya lingkungan dan simbol-simbol religi masyarakat Tengger.

Konkretnya, pada satu sisi, Wong Tengger tak akan bisa dipisah atau terpisah dari Gunung Bromo dan Tengger serta *Segoro Wedhi* dan

gunung-gunung sekitarnya, sebab situs-situs itu merupakan pusat-pusat kosmos kehidupan mereka, dengan Bromo-Tengger sebagai inti kosmosnya. Pada sisi lain, kawasan Bromo-Tengger itu demikian indah, mengundang banyak wisatawan lokal dan mancanegara untuk berbondong-bondong mengunjunginya. Semakin banyak orang mengunjungi Bromo-Tengger, berarti makin meningkatnya pendapatan tambahan bagi masyarakat Tengger yang mengelola wisata. Namun, marak dan membludaknya kunjungan wisata ke Bromo-Tengger, jika tak dikelola dengan benar, dapat merusak Gunung Bromo, Tengger, *Segoro Wedhi*, Pananjakan, dan kawasan sekitarnya—yang berarti juga rusaknya pusat-pusat kosmos *Wong Tengger*.

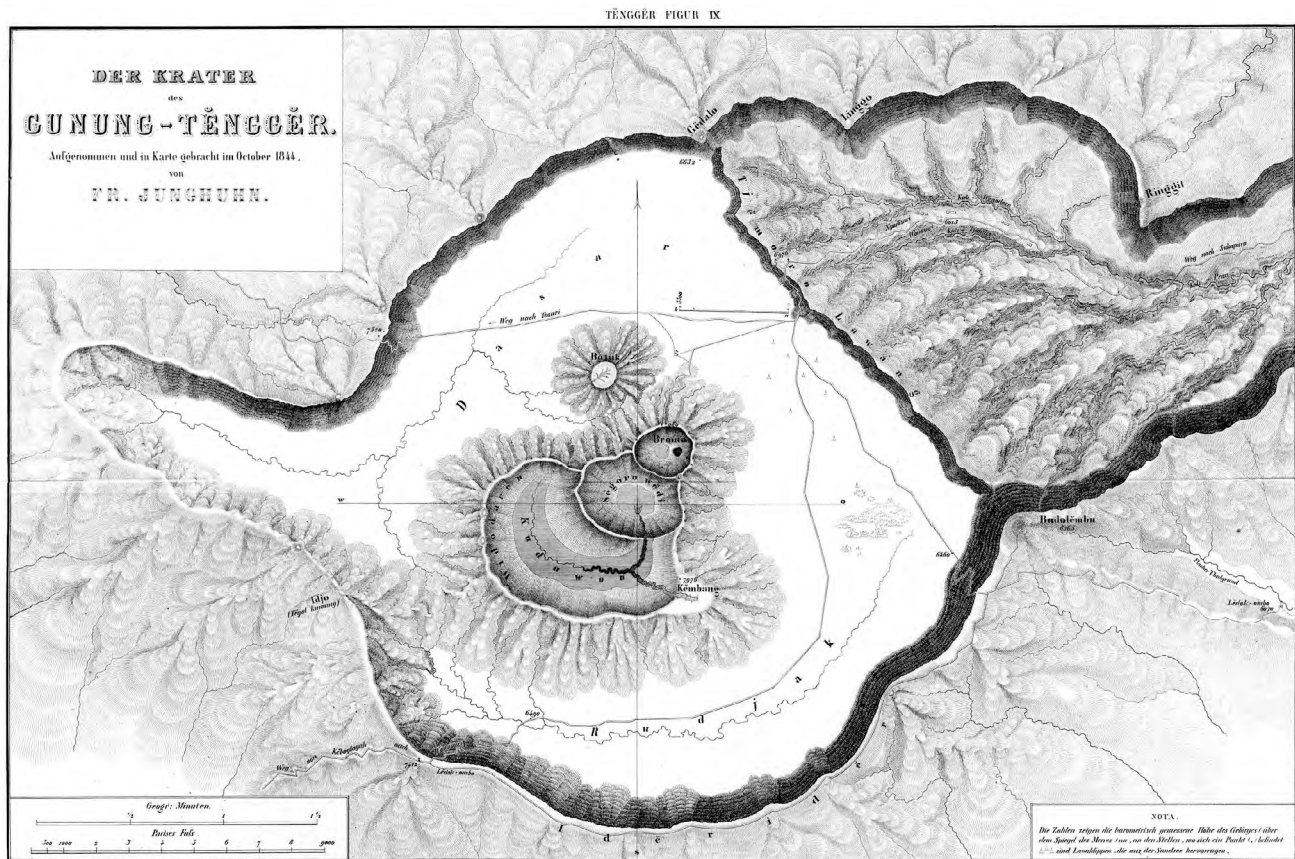
Kerugian yang akan terjadi bukan saja hilangnya keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata, tetapi juga runtuhnya identitas *Wong Tengger* karena musnahnya situs-situs keramat dan wilayah adat mereka. Bencana sosial itu tak boleh terjadi, karena dampak langsung dan tak-langsungnya tentu tak hanya akan menimpa masyarakat Tengger saja: apa artinya menjadi *Wong Tengger* tanpa Gunung Bromo, Tengger, *Segoro Wedhi*, dan kawasan luas sekitarnya? Lebih lagi, rusaknya situs-situs keramat Tengger itu sama dengan hancurnya ekosistem yang dikandungnya—dan itu berarti bencana lingkungan yang tak terbayangkan dahsyatnya. ●



Tangga menuju puncak Gunung Bromo.

Foto diambil antara tahun 1885–1920, oleh Onnes Kurkdjian, Surabaya, koleksi Museum Volkenkunde, Belanda.

Pengelolaan Kolaboratif Berlandaskan Lemahnya Motif



Bukankah dataran tinggi Bromo-Tengger-Semeru merupakan wilayah kuasa pemerintah, yang perlindungan dan pelestariannya menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS)? Memang benar. Meski demikian, tak mungkin membebankan tanggung jawab mahabesar itu hanya kepada pemerintah, dalam hal ini pengelola BB-TNBTS, saja.

Di atas kertas, pihak taman nasional tidak akan mampu mengelola kawasan Bromo-Tengger-Semeru sendirian. Di antaranya karena sam-

pai kini belum juga ditemukan sistem yang dianggap mapan untuk mengurus dan mengatasi berbagai persoalan menyangkut pengelolaan taman nasional. Karenanya, tidak bijak rasanya menyerahkan urusan mahapenting ini hanya kepada suatu badan pengelola yang bahkan belum menemukan sistem pengelolaan yang andal.

Sejak mula pertama taman nasional lahir di Indonesia pada 1980, konsep pengelolaan taman nasional senantiasa berubah-ubah. Paradigma pengelolaan yang mula-mula diterapkan adalah pendekatan perlindungan (*security approach*), yang mengutamakan kepentingan pelestarian (konservasi) di atas berbagai kepentingan lainnya. Paradigma ini menafikan peran masyarakat lokal berikut kearifan-kearifan tradisional yang telah berabad-abad mereka yakini dan terapkan.

Pada 1994, konsep pengelolaannya mulai mengakui keberadaan masyarakat sekitar taman nasional dan kearifan mereka. Menyusul kemudian, pada 2004, peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) taman nasional diupayakan muncul dalam suatu kerja sama (kolaborasi) pengelolaan. Hanya saja, cara pandang yang digunakan masih menganggap masyarakat, termasuk masyarakat adat, sebatas sebagai obyek pengelolaan belaka.

Pada 2006, lahir kebijakan pengelolaan taman-nasional-model, dengan ditetapkannya 20 taman nasional sebagai taman nasional mandiri. Sayangnya, kebijakan itu tak kunjung diikuti dengan pedoman pelaksanaannya, sehingga sampai saat ini masih belum ada taman nasional yang mampu mandiri dalam biaya operasionalnya.

Kemudian, diterbitkanlah kebijakan taman nasional berbasis resort: membagi kawasan taman nasional menjadi area-area berluas tertentu yang relatif mudah dikelola (*manageable*)—mencontoh sistem pengelolaan hutan yang diterapkan Perum Perhutani.

Apakah kemudian perbaikan-perbaikan terus-menerus terhadap konsep-konsep pengelolaan itu dapat mengatasi problem-problem “klise”—problemnya itu-itu saja—taman nasional? Tampaknya tidak. Di beberapa taman nasional yang serupa (namun jelas tak sama) kondisi wilayah dan sifat wisatanya, misalnya Bromo-Tengger-Semeru dibanding Gede-Pangrango dan Halimun-Salak, problematiknya tetap tak berubah dari masa ke masa: pembalakan liar berskala lumayan besar (komersial) sampai yang kecil-kecil “sekadar untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal”; sampah di pusat-pusat wisata; pencemaran



Dikutip dari situs indonesiautvclub.com:

“Gurun pasir yang terletak di bawah Gunung Bromo menjadi arena *high-jump* bagi anggota IUTVC.”

“Atraksi *high-jump* UTV yang dipertontonkan di Pasir Berbisik menarik perhatian pengunjung Gunung Bromo ... Didukung oleh Semeru 4X4 Community, komunitas Jeep kota Malang, Indonesia UTV Club mengitari area Taman Nasional Bromo.”

Sumber foto: indonesiautvclub.com, Catatan Kecil Tour Indonesia UTV Club ke Gunung Bromo, 27-28 November 2012.

Foto-foto di atas sepatutnya memicu pertanyaan: bagaimana bisa terjadi dalam kawasan konservasi, tanpa pelakunya merasa bersalah telah bertindak sembrono?

sumber-sumber air bersih; membludaknya pengunjung; “kurangnya” personil di tingkat resort, yang dampaknya salah satunya adalah jarang patroli lapangan; vandalisme pengunjung terhadap fasilitas wisata; kurangnya wibawa pengelola taman nasional di mata wisatawan; dan sebagainya. Masalah-masalah itu seperti tak tersentuh, dan karenanya seperti sangat sulit diatasi.

Namun, bagaimana pun, pengelola taman nasional tak dapat sepenuhnya disalahkan atas tak kunjung berkurangnya segala masalah perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi itu. Sebab, posisi para pengelola taman nasional itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis, mirip serdadu yang dipaksa maju ke garda depan tanpa bekal amunisi yang cukup. Sebagai salah satu contoh: dari sekian rupiah hasil penjualan retribusi/karcis masuk kawasan taman nasional, berapa banyak yang kembali ke kas taman nasional? Dalam kasus BB-TNBTS—dan serupa saja kasusnya dengan taman nasional lain: hanya 5% saja yang diterima taman nasional.

Prosentase yang sama, 5%, disetorkan ke Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III. Prosentase terbesar, 40%, disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang—masing-masing mendapat porsi yang berbeda-beda, proporsional terhadap penerimaan retribusi dari pintu-pintu masuk di setiap Pemkab itu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat jatah 20%. Kementerian Kehutanan mendapat 15%; Begitu juga Kas Negara (Bendahara Umum Negara), mendapat 15%.

Pendapatan 5% untuk pengelola taman nasional dari karcis masuk itu merupakan kebijakan lokal Gubernur Jawa Timur, bukan ketentuan Kementerian Kehutanan. Jadi, kecil sekali porsi yang didapat BB-TNBTS dari hasil wisata di Bromo-Tengger-Semeru, padahal pihak taman nasional pengelola sekaligus pencetak karcis masuk kawasan wisata.



Edelweiss (*Anaphalis javanica*) diperdagangkan di kawasan wisata Bromo.

Foto oleh: Mio Cade (*ramdiboy, flickr.com*) “A flower seller at the volcano slope of Bromo”, taken on December 23, 2008.

Disinyalir, dalam 5–10 tahun mendatang, edelweiss jawa terancam punah dari kawasan Bromo. Punahnya edelweiss jawa dari Bromo-Tengger akan memicu timpangnya ekosistem, karena tumbuhan perintis ini berperan sangat penting di lingkungannya.

Jika edelweiss jawa punah, masyarakat adat Tengger akan kehilangan simbol *mandhape wahyu*, yang berpotensi memperparah krisis identitas sosial mereka.

Sila baca lampiran di halaman 26, *Melestarikan Edelweiss Jawa, Simbol Turunnya Wahyu: tawaran solusi bagi masalah edelweissjawa ini.*

Pengelolaan Kolaboratif sebagai Tawaran Solusi

Di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, yang akan paling langsung terkena dampak kerusakan kawasan Bromo-Tengger-Semeru—dan yang akan paling parah menderita—adalah masyarakat-adat Tengger, yang telah ber-

abad-abad menetap di sekitar Taman Nasional, yang wilayah adat mereka berada dalam kawasan Taman Nasional. Merekalah yang mestinya berkepentingan paling besar atas lestarinya kawasan Bromo-Tengger-Semeru, hingga karenanya upaya-upaya pelibatan-aktif mereka dalam menjaga kelestarian Kawasan Taman Nasional perlu diprioritaskan.

Pelibatan-aktif itu artinya melibatkan masyarakat-adat Tengger dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, juga dalam proses pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pengelolaan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Pada tahap perencanaan, dapat saja dilakukan konsultasi publik oleh Taman Nasional kepada masyarakat Tengger. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat bisa didorong untuk proaktif menjaga kelestarian kawasan konservasi, karena lestarinya Taman Nasional identik dengan lestarinya wilayah adat mereka. Terkait penerimaan manfaat, keberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan dalam bidang pariwisata, pertanian, dan pengolahan hasil hutan tertentu tanpa perlu menyalaahi prinsip-prinsip pelestarian. Pemantauan dan evaluasi dapat diwujudkan lewat temu-koordinasi rutin—misalnya bulanan atau per tiga bulan—antara pemerintah (BB-TNBTS) dengan masyarakat Tengger.

Tentu saja upaya pelibatan masyarakat itu bukan proses mudah, namun konsep pengelolaan kolaboratif yang ditetapkan pada 1994 dan 2004 dapat dijadikan titik tolak. Hanya saja, pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) dan terutama Unit Pelaksana Teknis BB-TNBTS perlu secara radikal mengubah cara pandang mereka yang, diakui atau tidak, masih menganggap masyarakat, utamanya masyarakat adat di sekitar Taman Nasional, sebatas sebagai obyek pengelolaan belaka.

Pada sisi masyarakat, upaya pelibatan itu akan relatif mudah dilaksanakan karena, *pertama*, masyarakat Tengger punya simpul-simpul “komando” dalam pranata sosial mereka, yakni para *dukun pandhita* Tengger yang sangat mereka hormati petuah dan titahnya. Hampir dapat dipastikan bahwa para pemimpin adat Tengger itu akan antusias untuk benar-benar dilibatkan dalam pengelolaan Taman Nasional—dan masyarakat akan mengamini fatwa para pemimpin adat mereka. Bahkan bisa jadi “*political will*” itulah yang mereka tunggu-tunggu selama ini: niat-kuat pemerintah untuk melibatkan masyarakat Tengger,



Petani Tengger memanen kentang di Tosari, Pasuruan, Jawa Timur, pada 22 Juli 2010. Produktivitas kentang di gunung Bromo menurun dari Rp 16 ton per hektare menjadi 13 ton per hektare akibat anomali iklim.

Foto: Musyawir, ANTARA

memosisikan mereka sebagai salah satu pelaku dalam mengelola kawasan Bromo-Tengger-Semeru yang juga merupakan tanah adat mereka.

Kedua, perlu diingat, sejarah panjang masyarakat Tengger sejak zaman penjajahan sampai kini, seperti telah diuraikan di atas, adalah sejarah peminggiran (marginalisasi) dan pertarungan untuk menghegemoni, bahkan menguasai, masyarakat Tengger dalam berbagai aspek kehidupan mereka oleh berbagai kekuatan dan kepentingan dari luar Tengger. Sedemikian sengit dan kompleksnya “gempuran” itu, sampai-sampai bisa dikatakan bahwa masyarakat Tengger mengalami krisis identitas. Oleh sebab itu, upaya memosisikan mereka sebagai pelaku-aktif pembangunan dalam pengelolaan kolaboratif BB-TNBTS akan berterima dengan baik—*tumbu ketemu tutup*.

Akan tetapi bagaimana pun juga, saat-saat ini, pelibatan-aktif masyarakat Tengger dalam suatu pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru itu tampaknya hanya akan menjadi wacana yang pada praktiknya jauh panggang dari api. “Terlalu ideal” dan tidak membumi. Di antaranya karena rumit dan kompleksnya manajemen taman nasional. Kebijakan-kebijakan penting seperti tak akan kunjung menjadi keputusan karena para pewartannya seolah saling menunggu: tergantung keputusan Kepala Balai dan Menteri Kehutanan. Belum lagi sebab banyaknya pemangku kepentingan taman nasional yang masing-masing merasa perlu mengawal agar kepentingannya tak terganggu oleh suatu keputusan strategis tertentu.



Menjelang larung sesaji pada upacara Kasada di Bromo.

Foto: Jeri Kusuma, 2012.
jaring-ide.com

Lainnya adalah karena sistem pengelolaan kolaboratif itu perlu perubahan mendasar (radikal), mulai dari penggeseran bahkan perubahan paradigma (misalnya, masyarakat pinggiran hutan itu bukan kumpulan orang yang tak bisa diajak bekerja sama dalam sistem “modern”)—dan mengubah paradigma itu hampir sama sulitnya dengan mengajak orang berganti keyakinan.

Lagi pula, pengelolaan kolaboratif bukanlah hal baru. Saking seringnya diwacanakan di berbagai forum dan media sejak 1994, konsep ini sampai terdengar rada klise, sementara penerapannya masih jauh dari yang digadang-gadang. Jadi, “mimpi” melibatkan masyarakat Tengger dalam suatu kerja sama pengelolaan BB-TNBTS kelihatannya masih akan butuh waktu sangat panjang untuk dapat terlaksana.

Pesimis? Bukan, melainkan realistik. ●

Meningkatkan Keberdayaan lewat Penguatan Identitas, Pendidikan Kritis, dan Fasilitasi

Seandainya konsep pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat adat Tengger secara ajaib disetujui pada saat-saat ini, tampaknya masyarakat Tengger belum siap menghadapinya. Kemungkinan yang paling tampak di depan mata adalah: masyarakat Tengger akan terasuki euforia akibat perubahan mendadak dari suatu kondisi “ekstrem negatif” (terpinggirkan, tergerus identitasnya, terposisikan sebagai obyek belaka, dsb.) menuju kondisi “ekstrem positif” (diarutamakan, diakui dan dihargai keberadaannya, diposisikan sebagai pelaku-penting, dsb.)

Euforia adalah perasaan gembira yang berlebihan. Kata “berlebihan”, yang juga bermakna “melampaui batas”, selalu berkonotasi negatif; dan kondisi berlebihan pun selalu berdampak buruk. Wajib dihindari. Untuk menghindarinya, dirasa perlu meningkatkan keberdayaan masyarakat Tengger agar pada saatnya kelak benar-benar siap menjadi mitra kolaboratif pemerintah (BB-TNBTS) dalam berperan sebagai pelaku pelestarian kawasan Bromo-Tengger-Semeru.

Upaya mendorong kesiapan masyarakat dengan meningkatkan keberdayaan mereka itu dapat diselenggarakan melalui tiga langkah yang perlu dilaksanakan secara bersamaan (simultan): *pertama*, menguatkan identitas sosial Wong Tengger; *kedua*, memfasilitasi penerapan Pendidikan Kritis bagi masyarakat Tengger—tua-muda; dan *ketiga*, memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Tengger dan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru untuk



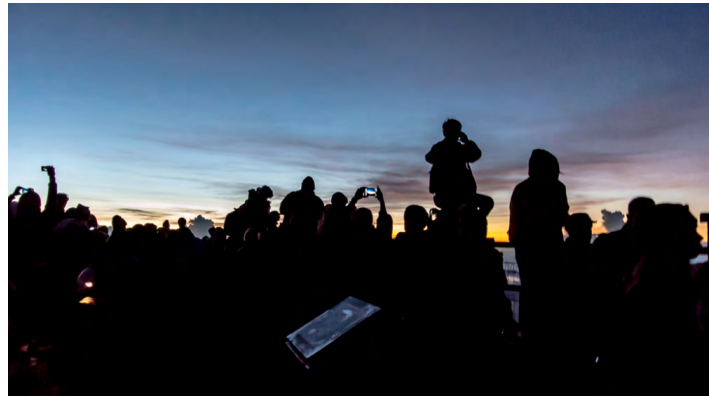
Seorang warga Tengger melakukan prosesi ritual di tempat Watu Dukun saat Gunung Bromo erupsi, 30 Desember 2010.

Foto: Budi Sugiharto, 2010

kelangsungan upaya pelestarian Taman Nasional.

Penguatan identitas sosial Wong Tengger perlu dilakukan, mengingat telah terjadinya dan masih berlangsungnya krisis identitas masyarakat Tengger akibat berbagai gempuran budaya “asing” terhadap sistem budaya dan pranata sosial masyarakat Tengger.

Penyelenggaraan **Pendidikan Kritis** yang bercorak partisipatif, tidak menggurui, dan dialogis diperlukan untuk memperkuat proses penguatan identitas sosial masyarakat Tengger di atas. Pendidikan Kritis adalah madzhab pendidikan yang bertujuan memberdayakan dan membebaskan pembelajarnya, masyarakat. Konsep pendidikan ini mencita-citakan perubahan sosial: terwujudnya masyarakat adil dan demokratis, tanpa eksploitasi dan penindasan. Dalam jangka pendek, ia mendorong proses pemanusiaan kembali (humanisasi), berupaya memulangkan manusia kepada fitrahnya: mengembalikan kondisi kemanusiaan mereka yang terjatuh ke dalam krisis sosial akibat dominasi peran dan hegemoni pelaku-pelaku sosial lain kepada kesetiaan diri mereka yang merdeka.



Proses Pendidikan Kritis bertolak dari kesadaran-kritis manusia: belajar dari kenyataan atau pengalaman, mengantarkan individu-individu pembelajarnya untuk memecahkan masalah-masalah eksistensial mereka secara bersama-sama.

Menyelarasi dua langkah peningkatan keberdayaan di atas, **pembangunan sarana dan prasarana** penunjang upaya pelestarian Taman Nasional perlu dilaksanakan, tentu dengan mengacu kepada *Master Plan* Taman Nasional dan skala prioritas. Misalnya, dalam jangka pendek, pemindahan (penetapan) jalur khusus kendaraan di *Segoro Wedhi* terasa sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, agar dampak negatif dari liarnya lalu-lintas kendaraan di lautan pasir Bromo-Tengger itu dapat segera diantisipasi sedini mungkin.

Juga renovasi infrastruktur Penanjakan-1 yang sejak lama telah menjadi fokus kajian pengelola BB-TNBTS terkait *carrying capacity*-nya, yakni batas maksimal daya tampung lokasi-pandang yang menjadi pusat kerumunan para wisatawan untuk menikmati panorama matahari terbit. Jika masalah daya tampung lokasi-pandang Penanjakan-1 itu tak segera dicarikan solusinya, bahaya longsor berpotensi terjadi akibat kelebihan beban kerumunan wisatawan. Dampaknya bukan saja rusaknya ekosistem, tetapi juga hilangnya lokasi-pandang paling strategis untuk menikmati *sunrise*: lenyapnya sarana penting penunjang ekowisata. ●

Berebutan memotret matahari terbit di Pananjakan-1.

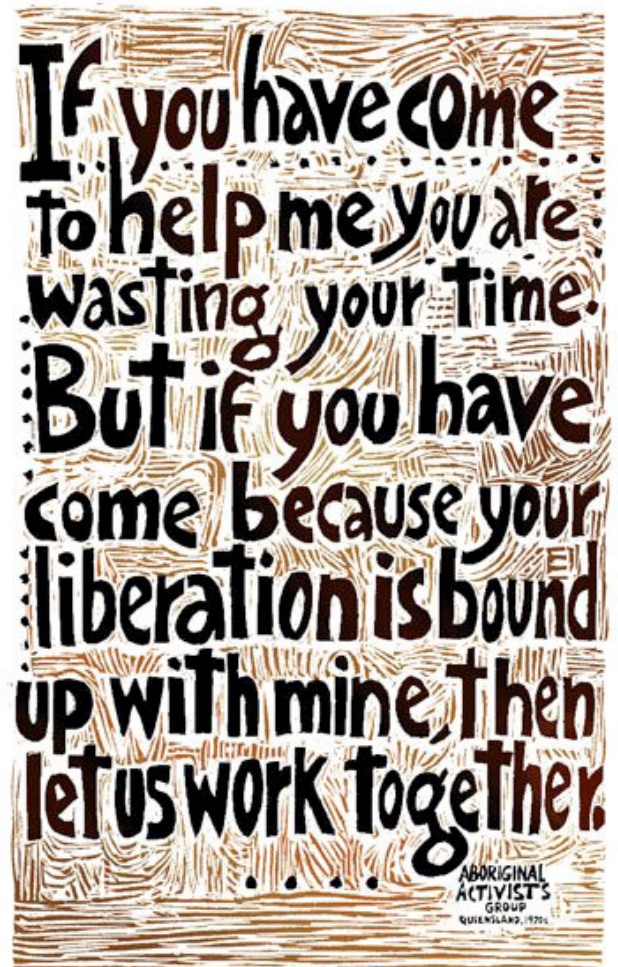
Foto: Ikhsa, April 2013.
iksamenajang.wordpress.com

Sahabat Bromo

*Kunjungi rakyat. Hiduplah bersama mereka.
Beljarlah dari mereka. Cintai mereka.
Mulailah dari apa yang mereka tahu.
Bangunlah dengan apa yang mereka punya.
Namun pemimpin terbaik adalah mereka yang
ketika pekerjaan telah tuntas dan tugas terlaksana,
rakyat berkata: kami sendiri yang mengerjakannya.*

—Lao Tse

Ketiga langkah peningkatan keberdayaan Wong Tengger tersebut selayaknya diselenggarakan oleh suatu lembaga yang dimotori oleh para pakar dan ahli lintas-disiplin, yang bergotong-ro-yong menangani program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai keahlian masing-masing, dalam satu irama *teamwork* yang padu. Selain merinci pijakan-pijakan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menetapkan suatu rencana kerja, mereka juga bertugas mengawal proses pelaksanaannya, agar jangan sampai terjebak pada upaya mengarahkan atau mendikte masyarakat. Sebab, proses ini adalah kerja mendampingi dan memfasilitasi masyarakat Tengger dalam pergulatan menguatkan identitas sosial mereka; Sama sekali tak boleh menjadi upaya mengarahkan dan menyematkan kepada mereka suatu identitas yang sejatinya tak diinginkan masyarakat—bahkan meskipun menurut para ahli, berdasar kajian mereka, identitas “itu” layak disandang masyarakat Tengger.





Adalah penting untuk hanya menemani perjalanan, menjadi sahabat, dan mendampingi masyarakat Tengger di sepanjang proses mereka berdialektika dengan dinamika kekinian yang mereka hadapi. Kelak, berbekal kesadaran kritis mereka, jati diri Tengger itu akan mereka “temukan sendiri”. Pada saat itu, mereka akan siap menjadi salah satu pelaku utama dalam pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru.

Bahkan, jika pada saat itu pihak Taman Nasional mengalami kejuduman, masih juga belum siap mengajak masyarakat adat Tengger berkolaborasi mengelola BB-TNBTS, daya kritis masyarakat Tengger rasanya akan cukup untuk melahirkan suatu pranata khas Tengger guna menjaga dan merawat kelestarian wilayah adat mereka yang dikuasai BB-TNBTS. Kegiatan-kegiatan pertanian akan berlangsung lebih lestari dan makin menghasilkan, pelayanan-pelayanan ekowisata oleh masyarakat akan terselenggara lebih semarak dalam keteraturan dan makin menguntungkan. Semuanya bercorak khas Tengger yang makin berkarakter, yang arif bijak memanfaatkan sumber daya alam sembari tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlangsungan. Semua bermula dari upaya mereka sendiri mengasah kesadaran kritis dan mengukuhkan jati diri ketenggeran. Semoga. ●

Kepala kerbau dan 100 tumpeng yang dibungkus daun tlotok, di antara sesaji pada upacara *Unan-unan*.

Foto: greenersmagz.com, 2012

“Mereka (masyarakat Tengger) akan selalu memintakan maaf dalam salah satu upacara adat, sebab (mereka paham) mengambil air, kayu di hutan, bercocok tanam, adalah merusak alam.”

—Purnawan D Negara, Dewan Daerah Walhi Jawa Timur yang sedang meneliti seputar hukum adat suku Tengger di Desa Ngadas.

Usulan Langkah-langkah Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Tengger

I. Penguatan Identitas Sosial Masyarakat Tengger

1. Studi kepustakaan, mengkaji berbagai hasil penelitian tentang masyarakat Tengger dan hal-hal terkait dengan mereka.
2. *Assessment* dan konsultasi publik terhadap masyarakat Tengger, mendokumentasikan harapan dan keluhan terkini mereka, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi di tingkat akar-rumput.
3. *Focused Group Discussion* (FGD) untuk menentukan *roadmap*, program dan kegiatan, dsb., berdasarkan hasil kegiatan poin 1 dan 2. Beberapa program dan kegiatan yang mungkin tepat untuk diselenggarakan adalah:
 - a. Pendokumentasian kearifan lokal masyarakat Tengger. "Ambisi"-nya adalah menulis semacam *Suluk Tambangraras* (a.k.a. *Serat Centhini*) khusus mengenai Masyarakat Tengger, sebagai "*baboning pangawikan Tengger*", ensiklopedi/induk pengetahuan Tengger.
 - b. Pendampingan masyarakat: revitalisasi norma-norma adat dan budaya Tengger.
 - c. Advokasi kebijakan untuk mendorong pengakuan pemerintah atas Agama Tengger.
 - d. Advokasi kebijakan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan kolaboratif BB-TNBTS yang memosisikan masyarakat Tengger sebagai pelaku penting.
 - e. Merancang dan menyelenggarakan pagelaran-pagelaran budaya Tengger: memupuk bangunan rasa percaya diri masyarakat Tengger, sembari menciptakan peluang-peluang ekonomi baru dalam bidang pariwisata.
 - f. Menggalang dukungan publik, salah satunya melalui inisiasi *Sahabat Tengger*, komunitas sukarelawan peduli Bromo-Tengger (upaya *crowdsourcing*).
 - g. Menggalang dana (*fundraising*) terutama lewat upaya *crowdfunding* sebagai alternatif dari cara-cara konvensional lainnya (pemanfaatan dana CSR perusahaan, *sponsorship*, dsb.)
 - h. Bekerja sama dengan penyelenggara *event* peduli masyarakat Tengger yang sudah ada, misalnya *Bromo Marathon* (*bromomathon.com*).

II. Fasilitasi Pendidikan Kritis (*Critical Pedagogy*) bagi Masyarakat Tengger

Pendidikan Kritis diselenggarakan untuk menunjang proses penguatan identitas sosial masyarakat Tengger. Juga untuk mendorong lahirnya daya cipta (kreativitas) masyarakat Tengger dalam mendialogkan adat dan budaya mereka dengan kekinian yang mereka hadapi.

Bentuk penyelenggaraannya kira-kira akan sebagai berikut:

- a. Pendampingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi mereka (mendampingi petani, pedagang, dan penyedia layanan wisata, mendorong penyusunan muatan lokal Agama Tengger untuk diajarkan di sekolah-sekolah, dsb.)
- b. Menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak-anak Tengger ("sekolah" berbasis komunitas).
- c. Membangun jaringan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat dan memfasilitasi kemudahan akses internet.
- d. Mendorong peningkatan budaya berpikir kritis (*critical thinking*) di kalangan masyarakat Tengger.

III. Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelestarian Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perlindungan/pelestarian Taman Nasional: sarana-sarana tertentu yang pengadaannya perlu disegerakan demi mencegah kerusakan yang lebih parah. ●

Melestarikan Edelweis Jawa, Simbol Turunnya Wahyu

EDELWEISS JAWA (*Anaphalis javanica*) punya posisi penting dalam adat Tengger. Masyarakat Tengger menamainya *tanalayu*, yang dimaknai *mandape wahyu* atau turunnya wahyu. Pada upacara *Kasada*, *Sesanding*, dan *Entas-entas*, *tanalayu* atau edelweiss jawa itu menjadi salah satu muatan sesaji. Bunga ini juga menjadi bahan pokok pembuatan *petra*, semacam boneka yang berfungsi sebagai *pelinggih atman*: tempat mempersemayamkan roh orang meninggal atau arwah leluhur yang diundang dalam suatu upacara. Dalam berbagai upacara adat Tengger yang melibatkan unsur mengundang arwah leluhur, selalu ada *petra*.

Edelweis jawa termasuk tumbuhan yang dilindungi. Manfaat ekologisnya tak ternilai. Bunganya menjadi sumber makanan bagi sekitar 300-an jenis serangga. Kulit batangnya bercelah dan mengandung banyak air, menjadi tempat hidup beberapa jenis lumut. Bagian akarnya yang muncul di permukaan tanah menjadi tempat hidup cendawan tertentu yang membentuk mikoriza:

kelompok jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan yang dilekatinya. Cendawan-cendawan itu mendapat oksigen dan tempat hidup dari edelweiss, sedangkan edelweiss mendapat unsur hara dari cendawan. Itulah sebabnya edelweiss jawa mampu hidup di tanah vulkanik muda yang tandus, menjadi tumbuhan perintis yang berfungsi “menyiapkan lahan” bagi tumbuh dan tersebarnya tumbuhan-tumbuhan lain.

Sebagai tumbuhan yang dilindungi, tentunya terlarang memetik edelweiss jawa dan apalagi memperdagangkannya. Akan tetapi karena ada permintaan pasar (*demand*) dari wisatawan, muncullah penyediaan barang (*supply*) oleh masyarakat Tengger.

Saat ini kondisi edelweiss jawa di Bromo memang masih dapat dikatakan belum kritis. Kerapatan edelweiss jawa di Gunung Batok masih berkisar 936,25 pohon/hektare. Data itu merupakan hasil penelitian Didik Wahyudi, UIN Malang, pada April–September 2010. Namun, bukan tak mungkin jika tidak diantisipasi, populasi edelweiss jawa akan menurun drastis dalam waktu dekat.



Penjual edelweiss.

Foto: Yovita,
jakartaphotoclub.com

Apa yang bakal terjadi jika edelweiss jawa di Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (BB-TNBTS) berkondisi kritis? Secara ekologis, keseimbangan ekosistem jelas akan terganggu, dan ketimpangan itu akan memicu terjadinya bencana lingkungan yang susul-menyusul. Secara sosial-budaya, jika edelweiss jawa menghilang, masyarakat adat Tengger akan kehilangan simbol *mandhape wahyu* yang disandang edelweiss jawa—salah satu unsur penting dalam ritual-ritual adat mereka. Terganggunya kelangsungan tradisi Tengger itu akan memperparah krisis identitas sosial yang hingga kini menghinggap *Wong Tengger*.

Tampaklah bahwa masalah “sepele” perdagangan edelweiss jawa di kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru itu berpotensi mengakibatkan masalah lingkungan dan sosial yang besar. Maka, perlu segera dilakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini.

Ada sedikitnya tiga gerakan yang dapat diselenggarakan secara simultan. *Pertama*, membudidayakan edelweiss jawa secara serius bersama masyarakat Tengger. *Kedua*, melegalkan perdagangan edelweiss jawa hasil budidaya masyarakat. *Ketiga*, melakukan kampanye penyadaran publik yang punya dua tujuan: *satu*, menandakan pentingnya kelestarian edelweiss jawa, *tanalayu*: simbol turunnya wahyu, bagi kelangsungan adat Tengger—sasarannya adalah masyarakat Tengger; dan *dua*, meruntuhkan mitos dan romantisme “bunga abadi” di kalangan masyarakat urban (wisatawan, terutama para pendaki gunung Indonesia)—sasarannya adalah masyarakat luas selain orang Tengger.

Budidaya edelweiss jawa itu bisa dikategorikan sebagai upaya konservasi eksitu (pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya). Pemerintah, dalam hal ini pengelola BB-TNBTS, perlu berinisiatif menyediakan suatu zona khusus yang akan difungsikan sebagai lahan budidaya edelweiss jawa, untuk dikelola secara bersama-sama dengan dan oleh masyarakat Tengger. Fasilitasi teknis terkait upaya budidaya edelweiss jawa juga perlu diselenggarakan, termasuk jika mungkin: menemukan terobosan semacam budidaya edelweiss jawa dalam pot-pot di rumah-rumah penduduk Tengger dan di pinggir lahan pertanian mereka.

Agaknya, poin pertama itu relatif mudah dilakukan selama ada kemauan (*political will*) pemerintah dan ketekunan menemani prosesnya. Sama mudahnya dengan pelaksanaan poin kedua: melegalkan perdagangan edelweiss jawa hasil budidaya masyarakat, sembari menindak tegas pemetik edelweiss nonbudidaya. Pada saatnya nanti, edelweiss jawa hasil budidaya itu juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan berbagai ritual adat Tengger.

Seiring dengan kedua gerakan di atas, kampanye publik perlu diselenggarakan secara sistematis. Bagi masyarakat Tengger, jika tepat cara pelaksanaannya, kampanye



Anaphalis javanica.

Pengelola BB-TNBTS, didukung *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, sudah merintis pembuatan Taman Konservasi Edelweis di wilayah Ranu Regulo, sekitar 300 meter dari Pos Ranu Pani. Sayangnya, hanya 5 pohon yang bertahan hidup dari 100-an pohon yang dibudidayakan pada tahap awal, selebihnya sekarat dan mati. Cuaca ekstrem dianggap sebagai penyebab kegagalannya.

Tampaknya pemerintah perlu belajar dari para petani Dieng yang berhasil membudidayakan edelweiss jawa dan memperdagangkannya.

penyadaran itu akan relatif mudah berterima. Sebab, besar kemungkinannya mereka akan menyikapi kampanye itu sebagai dukungan nyata “pihak luar” untuk ikut menjaga agama dan tradisi Tengger. Bahkan, saat masyarakat Tengger benar-benar paham akan mahapentingnya menjaga kelestarian simbol *mandhapa wahyu, tanalayu, edelweiss jawa* itu, mungkin sekali mereka akan menjadi penjaga edelweiss jawa dari tindakan vandalisme di garda paling depan: langsung berhadapan dengan para ekowisatawan pengunjung Bromo-Tengger-

Semeru. Bisa jadi pula kelak para vandal dari luar Tengger, pemburu *tanalayu*, itu akan gentar sebelum sempat berbuat karena takut dikenai denda adat oleh Wong Tengger. Ini jika upaya-upaya penguatan identitas *Wong Tengger* berhasil diselenggarakan. ●



“Bromo Angel”, karya Bambang Leksmono, pixoto.com

Si model berpose mendekap edelweiss jawa. Kenapa harus edelweiss, sih?

Mestinya ada konsep visual lain yang bahkan akan lebih asosiatif dengan Bromo dibanding menggunakan materi edelweiss jawa, agar foto ini menjadi tak hanya bagus, tapi juga *eco-friendly*.

Ranupane, di Tengah Ancaman Erosi Kultural dan Erosi Ekologi

Sumber: greenersmagz.com, Kamis, 27 Desember 2012



Danau Ranupane. Foto: greenersmagz.com

HUJAN baru saja mengguyur Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air lumpur mengalir perlahan namun pasti turun dari atas bukit yang terlihat coklat. Melalui celah selokan, dan kadang meluber ke jalan sehingga aspal jalan desa terlapisi air lumpur. Air lumpur terus mencari tempat yang lebih rendah hingga akhirnya bermuara ke Danau Ranupane. Danau eksotis yang berada di ketinggian 2.162 mdpl di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Danau yang baru saja menjadi lokasi pengambilan gambar film 5cm ini kini menghadapi tantangan yang cukup serius.

Danau seluas kurang lebih 2,5 hektare ini memiliki kenangan tersendiri bagi para pendaki yang akan menuju Gunung Semeru. Bahkan penyanyi almarhum Gombloh pun menciptakan lirik salah satu lagunya yang terinspirasi dari Danau Ranupane. Danau ini berada di tepi Desa Ranupane yang luasnya sekitar 14 hektare. Namun, kondisi Danau Ranupane kini jauh berbeda dengan kondisi 10 tahun silam. Diperkirakan sudah lebih dari 30 persen danau ini mengalami penyempitan karena mengalami sedimentasi akibat lumpur dari perbukitan yang kian menipis. Tergerus air hujan dan mengalir ke danau.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, menjelaskan, ancaman Danau Ranupane tinggal cerita hanya soal waktu saja, jika semua pihak terutama pemerintah tidak mengambil sikap yang strategis bersama warga lokal untuk menyelamatkan danau yang eksotis ini. "Bertahun-tahun tertutup tanaman salvinia, tapi bisa dibersihkan secara gotong royong dalam tempo 40 hari," kata Purnawan D Negara, ditemui *Greenersmagz*, Rabu (26/12/2012).

Menurutnya, persoalan sedimentasi tidak semata-mata karena masalah kesalahan pengolahan lahan pertanian yang dilakukan warga dengan tidak melakukan sistem terasering. Purnawan mengambil contoh bahwa sudah bertahun-tahun warga Tengger melakukan sistem pertanian seperti saat ini dan tidak ada persoalan. Kalau sekarang memunculkan erosi yang tinggi perlu diteliti apakah memang masalah teknis pengolahan lahan atau yang lain.

Ia menjelaskan, warga Suku Tengger mempunyai aturan-aturan tertentu dalam memperlakukan alam seperti mengolah lahan pertanian maupun mengambil batang pohon dan lain sebagainya. Saat ini, tidak semua warga di Desa Ranupane yang menggarap lahan merupakan orang Tengger. Sehingga ada nilai-nilai dan aturan-aturan warga Tengger yang tidak dilakukan sebagian besar warga. "Saya melihat ada erosi kultural yang berujung pada erosi ekologis di sana," kata Purnawan.

Ditambahkan Purnawan, saat ini yang paling tepat dilakukan adalah melakukan moratorium dengan mengajak warga sekitar berembung untuk tidak menanam tanaman yang panen dalam hitungan bulan di lahan-lahan yang kritis. Ia yakin kalau ini dilakukan dengan pendekatan kultural bisa terlaksana, karena sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kearifan lokal mengenai masa tanam yang baik dan melarang mengganggu wilayah-wilayah tertentu.

Salah satu petani yang tinggal di Desa Ranupane, Budi Santoso, mengakui jika ketinggian bukit-bukit yang berada di sekitar Danau Ranupane memang mengalami penurunan akibat erosi. Ia mengaku jika lahan di perbukitan Danau Ranupane tidak bisa diolah dengan menggunakan sistem terasering karena kontur tanahnya yang gembur. "Saya sudah pernah mencobanya namun tetap tidak bisa," kata Budi yang tinggal di sana sejak tahun 90-an.

Pengendali Eksosistem Hutan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Boiga, mengatakan, pihaknya sudah mengajak masyarakat setempat untuk membuat jebakan-jebakan lumpur untuk mengurangi derasnya lumpur yang masuk ke danau ketika musim hujan. Selain itu, ia juga mengajak para petani di sana mengolah lahan dengan membuat sistem terasering. "Tapi ya warga tetap bandel," ujarnya.

Untuk upaya pengerukan, kata Boiga, sulit dilakukan karena mendatangkan alat berat ke sana sangat sulit dengan kondisi jalan yang sempit dan menanjak. Karena itu, saat ini yang dilakukan taman nasional adalah memberikan sosialisasi pentingnya menjaga dan menyelamatkan Danau Ranupane dengan melakukan pengolahan lahan yang benar untuk meminimalisir erosi.

Harapan warga sekitar untuk melihat Danau Ranupane bersih dan indah seperti dulu masih ada. Namun, kata Purnawan, mereka takut untuk bertindak karena beranggapan itu wilayah taman nasional sehingga semacam ada keterputusan komunikasi antara pemerintah dengan warga desa. "Yang pasti, Danau Ranupane akan menjadi cerita jika tidak diselamatkan," Pungkas Purnawan. ●